

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi yang memiliki tujuan menyediakan atau memproduksi barang publik merupakan pengertian dari Organisasi sektor publik. Tujuan dari organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan kesejahteraan. Dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya berhubungan usaha menghasilkan barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik (Nurillah dan Muid, 2018).

Pelayanan publik yang tidak memuaskan masyarakat dalam pengelolaan administrasi publik dan tata kelola yang baik merupakan isu yang tidak asing lagi. Akuntabilitas sektor publik diperlukan guna dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik untuk memenuhi hak publik. Salah satu komponen penting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik adalah laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari kinerja yang berhubungan dengan keuangan dalam periode tertentu kepada pengguna laporan. Laporan keuangan harus menyajikan seluruh informasi keuangan yang dibutuhkan pengguna. Informasi yang diberikan kepada pengguna haruslah berkualitas dan dapat dijadikan dasar bagi para pemeriksa keuangan. Laporan pemerintah daerah setidaknya terdiri dari neraca, laporan realisasi

anggaran, laporan arus kas, laporan surplus/defisit. Manfaat bagi pihak eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah yang mencakup informasi keuangan daerah digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Untuk pihak internal, laporan keuangan sebagai penilaian kinerja, menyusun rencana kerja, dan sebagai pengendali suatu perusahaan.

Adanya tuntutan akuntabilitas publik yang semakin besar maka menimbulkan implikasi bagi manajemen untuk memberikan informasi kepada publik, dengan memberikan laporan keuangan yang berkualitas. Komponen laporan keuangan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010, laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami.

Lampiran II SAP (Paragraf 33-37) menjelaskan bahwa laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi didalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunaannya dengan melakukan evaluasi peristiwa dimasa lalu atau masa kini dan masa depan. Dikatakan andal apabila terbebas dari pengertian yang tidak benar atau menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta dengan jujur dan dapat diverifikasi. Serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, dan dapat dipahami penggunaannya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu organisasi sektor publik yang memiliki peran penting terhadap kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

harus berkualitas karena kualitas pada laporan keuangan merupakan aspek yang sangat penting untuk pengambilan keputusan. Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah melakukan sistem pengendalian internal untuk mengelola keuangan yang efektif dan berkualitas atas pembuatan laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menerima evaluasi tahunan berbentuk pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD. Maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah disajikan serta diungkapkan secara adil dan berkualitas. Terdapat empat pendapat yang diberikan BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (OTP), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Opini Tidak Memberi Pendapat (MTP). (Tawaqal dan Suparno, 2017)

Fenomena yang terjadi pada pemerintah daerah kabupaten pati adalah pemerintah kabupaten pati untuk kesekian kalinya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena dinilai mampu menyajikan laporan keuangan pada 2019 dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Pemerinah Kabupaten Pati mempertahankan opini yang telah diraih tahun sebelumnya yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019. Sebelum tahun 2016 pemerintah kabupaten pati mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) akan tetapi semakin bertambahnya tahun maka laporan keuangan yang dihasilkan semakin berkualitas sehingga opini yang didapat juga semakin bagus. Pemerintah Kabupaten pati pada tahun 2016-2019 mempertahankan opini yang diraih pada

tahun sebelumnya secara berturut-turut. Pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Akan tetapi, masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sehingga masih terdapat temuan yang harus ditindak lanjuti untuk perbaikan selanjutnya. Salah satunya adalah sumber daya manusia yang terbatas sehingga berkemungkinan untuk menghasilkan laporan yang kurang efektif. (<https://www.patikab.go.id/>)

Sistem pengendalian internal menjadi salah satu faktor untuk pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Sistem pengendalian internal adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berulang – ulang oleh pemimpin dan pegawai untuk memerikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi dari kegiatan efektif dan efisien, keandalan dalam laporan keuangan, keamanan aset negara, dan taat terhadap peraturan perundang – undangan, (PP No. 60 Tahun 2008). Dengan demikian, pengendalian internal merupakan hal yang sangat penting dalam pemerintahan, sebagai pondasi dalam melawan ketidak stabilan data dan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut penelitian Lestari dan Dewi (2020) Teknologi Informasi adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh teknologi informasi dan sumber daya manusia yang dibuat untuk dipergunakan sebagai membantu organisasi dalam mencapai tujuan tertentu.

Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mendapatkan informasi, menghasilkan, menangani informasi, mempersiapkan, mengatur,

mengendalikan, menyimpan dipergunakan untuk individu atau bisnis dengan tujuan untuk mengakses dan mengawasi secara jeli untuk pengambilan suatu keputusan (Ayem & Karlina, 2021).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah pencatatan, penggolongan, perangkuman kegiatan transaksi dari keuangan dan pengendalian untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas. demi kelancaran dan kemajuan dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang dapat dilakukan secara manual atau dapat menggunakan komputerisasi (Permendagri No. 59 tahun 2007).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pasti dibutuhkan sumber daya manusia sebagai penggerak atau menjalankan sistem yang ada. Maka, sumber daya manusia yang berkompeten sangat dibutuhkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Firmansyah dan Sinambela, 2020) terdapat dua perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu penelitian sebelumnya terdapat satu variabel independen yaitu sistem pengendalian internal. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Mokoginta dkk, 2017) terdapat dua variabel independen yaitu sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah Sedangkan pada penelitian ini saya menambahkan variabel independen yaitu teknologi informasi, sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), dan sumber daya manusia. Alasan penambahan variabel 1. Variabel Teknologi informasi karena komputer sebagai bagian dari teknologi informasi membawa perubahan bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan

adanya teknologi komputer akan mempermudah pekerjaan dalam pembuatan laporan keuangan. Selain itu juga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan. 2. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah karena komitmen organisasi merupakan suatu keadaan karyawan memihak kepada perusahaan tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotaannya dalam perusahaan tersebut. Sehingga, semakin besar komitmen seseorang terhadap organisasi maka semakin berpengaruh terhadap suatu kualitas laporan keuangan. Dengan adanya susunan kerja dan komitmen kerja yang baik dalam suatu perusahaan maka akan lebih mudah untuk mencapai atau meraih tujuan Bersama yang telah diinginkan. 3. Variabel sumber daya manusia karena sangat penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya sehingga laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu. Sumber daya manusia yang kompeten juga akan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan teliti dalam melakukan pencatatan data. Perbedaan yang ke dua adalah pada penelitian terdahulu berada di Organisasi Perangkat Daerah kota malang, sedangkan pada penelitian saya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan untuk itu peneliti mengambil judul **"Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan**

Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pati”.

1.2 Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan memudahkan pembahasan penelitian ini agar sesuai dengan tujuan penelitian dan pokok dari apa yang dibahas , maka ruang lingkup pokok bahasan dalam permasalahan sebagai berikut:

1. Membahas variabel independen yaitu sistem pengendalian internal (X1), teknologi informasi (X2), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) (X3), sumber daya manusia (X4).
2. Membahas pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan (Y).
3. Membahas pengaruh sistem pengendalian internal, teknologi informasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Meneliti Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pati

1.3 Rumusan Masalah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan pihak internal maupun eksternal sejak tahun 2016-2019 mengalami peningkatan. Sebelum tahun 2016 pemerintah kabupaten pati mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Akan tetapi, pada tahun 2016-2019 Pemerintah

kabupaten pati untuk kesekian kalinya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan mempertahankan opini yang telah diraih pada tahun sebelumnya. Adanya peningkatan kualitas yang diberikan oleh pemerintah kepada banyak pihak terkait akan menimbulkan berbagai permasalahan yang terjadi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati terhadap kualitas laporan keuangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kurang efektif dan handal dalam menyusun laporan keuangan serta adanya potensi terjadinya penyalahgunaan laporan keuangan atau korupsi oleh aparat pemerintah daerah. Berdasarkan pembatasan masalah yang diuraikan maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
4. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Manfaat bagi pembaca

Memberikan gambaran mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, teknologi informasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Juga sebagai referensi, acuan, dan bahan masukan untuk penulis selanjutnya.

b. Manfaat untuk penelitian selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai kualitas laporan keuangan dengan variabel independen lain.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dalam memecahkan masalah terutama kemungkinan timbulnya dampak negatif terhadap aspek-aspek kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan tentang pentingnya sistem pengendalian internal, teknologi informasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Manfaat bagi perguruan tinggi

Dalam hal ini Universitas Muria Kudus khususnya fakultas ekonomi dan bisnis prodi akuntansi, penulis dapat menyumbangkan pikiran tentang pengaruh sistem pengendalian internal, teknologi informasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.